



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENGANGGURAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2001-2016**

SKRIPSI

Oleh:
Ilyas Karim Abdulloh
140810101134

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENGANGGURAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2001-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Ilyas Karim Abdulloh
140810101134

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Siti Khosimah dan Ayahanda Sodik tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Bapak/ Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan tulus, penuh keikhlasan serta kesabaran dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi .
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.”

(Q.S Al-Baqarah: 195)

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan berkejahlah yang membuat kita berharga.”

(K.H. Abdurrahman Wahid)

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.”

(Jim Rohn)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Karim Abdulloh

NIM : 140810101134

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Ilyas Karim Abdulloh

NIM 140810101143

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENGANGGURAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2001-2016**

Oleh

Ilyas Karim Abdulloh
140810101143

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aisah Jumiati, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap
Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-
2016

Nama Mahasiswa : Ilyas Karim Abduloh

NIM : 140810101134

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 08 Oktober 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aisah Jumiati, S.E., M.P.

NIP. 196809261994032002

Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

NIP. 196907181995122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENGANGGURAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2001-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ilyas Karim Abdulloh
NIM : 140810101134
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

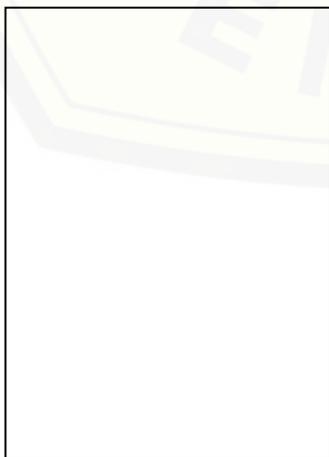
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 197002061994031002
2. Sekretaris : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
3. Anggota : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. (.....)
NIP. 198103302005011003



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak.
NIP 19710727 199512 1001

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016

Ilyas Karim Abdulloh

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan menurunnya tingkat pengangguran merupakan gambaran hasil kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Kinerja keuangan daerah yang semakin meningkat, diduga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, dan variabel kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran

*Analysis of Regional Financial Performance on Economic Growth and Its Impact
for Unemployment in Banyuwangi Regency 2001-2016 Period*

Ilyas Karim Abdulloh

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Increased economic growth and declining the unemployment rate is the description of the results of government performance in the welfare of its people. The Regional financial performance of the growing area, is expected to boost economic growth and reduce unemployment in the region. This study aims to determine the effect of the financial performance of economic growth and its impact on unemployment in Banyuwangi Regency 2001-2016 period. The analytical method used in this study using path analysis. Based on the results of the analysis showed that the variable of regional financial performance significant positive effect on the rate of economic growth, the rate of economic growth significant negative effect on the unemployment rate, and variable of regional financial performance through economic growth has a significant negative effect on the unemployment rate.

Keywords: Regional Financial Performance, Economic Growth and Unemployment Rate

RINGKASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016; Ilyas Karim Abdulloh; 140810101134; 2018; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian disuatu negara maupun daerah. Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi sehingga dapat menunjukkan bahwa suatu daerah tidak akan sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien dapat diketahui dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui melalui pendekatan-pendekatan seperti derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan untuk mengetahui pengaruh variabel kinerja keuangan daerah terhadap pengangguran baik secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) menggunakan data yang diperoleh dari anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik kinerja keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyuwangi. Pengaruh variabel kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016*” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Aisah Jumiati, S.E., M.P. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Lilis Yulianti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

6. Ibunda Siti Khosimah dan Ayahanda Sodiq yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat, dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;
7. Kakakku Imam Muttaqien yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang hingga saat ini;
8. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Muhammad Try Yulianto , Muhammad Yasin, Juniardi Putra Hariyanto, Ajih Putra Maulana, Muhammad Rizal Azizi, Mohammad Ali Sodikin, Bima Adi Prawira, Zainur Rosi, Seka Rifki Pamungkas, Kinanthi Ayu Mawarni, Vinky Roudhatul hasanah, Erlinda Dwi Alvianita, Wanda Arum Malinda, Titut Catur yuniarti, dan Dita Azizah Subandi, terimakasih atas motivasinya;
9. Mi'ilya Khoijah yang telah bersedia membantu dan memotivasi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman tercinta angkatan 2014 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbangan tenaga, semangat, dan pikiran yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini;

Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.2 Konsep Desentralisasi Fiskal	10
2.1.3 Keuangan Daerah	14
2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah	17
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.6 Pengangguran	23
2.1.7 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Metode Analisis Data	31
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	31
3.4.2 Analisis Jalur (Path Analysis)	31
3.4.3 Uji Hipotesis.....	32
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	34
3.5 Metode <i>Trimming</i>	36
3.6 Perhitungan Jalur	36
3.7 Definisi dan Pengukuran Variabel	38
BAB 4. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	42
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah	42
4.1.2 Topografi Kabupaten Banyuwangi.....	43
4.1.3 Keadaan Penduduk Kabupaten Banyuwangi	44
4.1.4 Kondisi Variabel Terkait.....	46
4.2 Statistik Deskriptif	54
4.3 Analisa Jalur (Path Analysis)	56
4.4 Menghitung Koefisien Jalur	60
4.5 Uji Hipotesis	61
4.5.1 Uji F	61
4.5.2 Uji t	62
4.6 Uji Asumsi Klasik	64
4.6.1 Uji Normalitas Data.....	64
4.6.2 Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.7 Pembahasan	66
4.7.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	66
4.7.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran.....	67
4.7.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran.....	68
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	39
Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	39
Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016	45
Tabel 4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2016 (dalam persen)	47
Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2016 (dalam persen)	48
Tabel 4.4 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016(dalam persen)	50
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2016 (Dalam Persen)	51
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Banyuwangi	55
Tabel 4.7 Hasil Path Analysis Variabel Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	57
Tabel 4.8 Hasil Path Analysis Variabel Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi	58
Tabel 4.9 Hasil Uji t	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data.....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2016.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
Gambar 3.1 Metode Analisis Jalur	32
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	43
Gambar 4.2 Tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001- 2016	52
Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2016.....	54
Gambar 4.4 Model Diagram Jalur Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016.....	74
Lampiran B Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016.....	75
Lampiran C Data Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016	76
Lampiran D Data Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016.....	77
Lampiran E Data Pendapatan Domestik Regional Bruto Banyuwangi	78
Lampiran F Data Tingkat Pengangguran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016	79
Lampiran G Statistik Deskriptif	80
Lampiran H Analisis Jalur.....	81
Lampiran I Uji Asumsi Klasik	83
Lampiran J Uji Hipotesis	84

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Sukirno (2008:423) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dengan perekonomian yang terus tumbuh maka kesempatan kerja, tingkat pengangguran dan kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, termasuk pendidikan akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian disuatu negara maupun daerah. Peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat umum, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004:110). Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian disuatu negara maupun daerah. Peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat umum, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat.

Dengan adanya pembaharuan peraturan tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya diatur dalam undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, menjadi undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk

mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan keuangan di daerah masing-masing. Pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralisasi kearah desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umum di suatu wilayah.

Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini dipandang sangat demokratis karena sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah tersebut, maka setiap daerah dapat membuat kebijakan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Tetapi, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus tetap berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Sebagaimana dalam pernyataan Bastian (2001:10). Reformasi Keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan otonomi penuh.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah tidak akan sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Namun tidak berarti apabila kemandirian keuangan daerah yang besar,

maka daerah tersebut tidak perlu lagi mendapatkan dana dari pemerintah melalui Dana Perimbangan. Dana Perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan suatu daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan pemerintahan suatu daerah dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran. Kebijakan desentralisasi di era otonomi daerah ini berguna untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal mengelola keuangan daerah. karena sumber utama APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sesuai undang-undang (UU) No. 33 tahun 2004 bab VI pasal 10 bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah (capital investment), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerah melalui PAD. Sumber PAD sendiri berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Lain Asli Daerah.

Pengelolaan kinerja keuangan daerah merupakan hal yang paling penting untuk menggambarkan bahwa suatu daerah dapat mengelola dengan baik, khususnya untuk PAD. Radianto dalam Halim (2001) mengemukakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahanya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus

semaksimal mungkin, agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. PAD merupakan indikator untuk mencapai pembangunan di masing-masing daerah. Pada daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan, akan sangat merasakan pengaruh dari investasi yang masuk ke daerahnya tersebut. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui melalui pendekatan-pendekatan seperti kemandirian keuangan daerah, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik di Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah dan inovasi layanan publik. Penghargaan ini diberikan Kemenkeu karena Banyuwangi dinilai telah memenuhi indikator utama dalam penilaian, di antaranya mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik untuk menunjang program-program pembangunan daerah. Penghargaan tersebut tidak lepas dari Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi yang baik dalam menerapkan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Menurut Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah diperlukan adanya suatu peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien yang dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu mengatur berbagai kebijakan diatas dengan menuangkannya dalam suatu peraturan daerah.

Penghargaan lain yang telah diterima oleh Kabupaten Bayuwangi adalah mengenai Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendapatkan nilai terbaik atau satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai A atau tertinggi dari Kemenkeu. Penghargaan tersebut

berdampak pada pemerintah kabupaten lain diantaranya: Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Lampung Tengah, Kotawaringin Timur, dan Pamekasan untuk melakukan studi banding terkait dengan penerapan SAKIP di Kabupaten Banyuwangi. Dari beberapa daerah tersebut memang secara khusus ingin belajar mengenai bagaimana cara menerapkan sistem manajemen kinerja pemerintahan ini supaya lebih efisien sehingga pelayanan publik di daerah masing-masing bisa menjadi lebih baik, serta mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kebijakan dan melakukan inovasi dalam desain program kegiatan.

Sejalan dengan penghargaan tersebut, PAD Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan dalam hal anggaran maupun realisasinya dalam 7 tahun terakhir. Berikut merupakan data perkembangan anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	
			(Rp)	%
2011	106.124.047.762,61	113.364.553.469,87	7.240.505.707,26	106,82
2012	132.846.110.220,82	139.514.584.000,37	6.668.473.779,55	105,02
2013	171.602.586.394,67	183.235.877.421,86	11.633.291.027,19	106,78
2014	225.108.843.353,75	283.488.703.181,03	58.379.859.827,28	125,93
2015	303.235.751.986,52	346.992.331.406,82	43.756.579.420,30	114,43
2016	353.260.988.692,26	367.929.703.427,10	14.668.714.734,84	104,15

Sumber : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, data diolah 2017

Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PAD yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan realisasi daripada PAD yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi selalu diatas dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dari tahun ke tahunnya. Realisasi terbesar diperoleh pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 283,49 miliar rupiah atau lebih Rp 58,38 miliar rupiah atau 125,93% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal mengelola kinerja keuangan daerah cukup

baik, sehingga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi setiap tahun anggarannya.

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan, maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Berikut merupakan data perkembangan PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2016



Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2016
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2017

Dalam Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan PDRB kabupaten banyuwangi tidak lepas dari kebijakan desentralisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan dana yang telah ditetapkan dalam APBN sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan pembangunan di berbagai sektor-sektor ekonominya. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah Banyuwangi saat ini dinilai baik khususnya untuk Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah giat memajukan Banyuwangi lewat kearifan lokalnya

serta dari perspektif pariwisata. Oleh karena hal itu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Namun seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi tersebut, pengangguran di Kabupaten Banyuwangi masih menjadi pekerjaan daripada pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 masih tergolong tinggi yaitu sebesar 07,17% di atas rata-rata Jawa Timur yang hanya mencapai 04,19%. Sedangkan yang terendah yaitu pada tahun 2015 yang hanya mencapai 02,55%. Pergerakan dari tingkat pengangguran yang masih fluktuatif dan cenderung tinggi perlu dilakukan intervensi kembali sehingga mampu mengatasi permasalahan terkait tingkat pengangguran tersebut.

Hamzah (2008) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Sedangkan Wuku Astuti (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. sementara pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, selain itu dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana hubungannya kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016?
3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari analisis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan lebih mendalam mengenai hubungan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mampu mengoptimalkan sumber PAD dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: auto berarti sendiri dan nomein berarti peraturan, atau undang-undang. Maka autonom berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Subrata, 2003). Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaho dalam Safi'i (2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian:

1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
2. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri.
3. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk

menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II) dengan dasar pertimbangan: pertama, dari dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relative minim. Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Ketiga, Dati II merupakan daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan, sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatkan local accountability Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan.

2.1.2 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/ fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih,2003).

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Stiglitz, 2000):

- a. Alokasi Fungsi alokasi sangat terkait erat dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan.
- b. Distribusi Adalah peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- c. Stabilisasi Adalah peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (agregat) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian fungsi ini lebih banyak dimiliki pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah.

Ditinjau dari cara penyediaannya, barang publik dapat dibedakan barang lokal (*local public goods*) dan barang publik nasional (*national public goods*). Jadi muncul suatu kondisi yang mengharuskan pembagian kerja antar strata

pemerintahan tentang “siapa mengerjakan apa”. Konsep desentralisasi fiskal dengan demikian seperti dirumuskan oleh De Mello (2000) adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan public services delivery dapat dijelaskan dalam kerangka teori fiscal federalism. Teori ini dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (First Generation Theories) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (Second Generation Theories). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

- a. Pertama adalah tentang penggunaan knowledge in society, yang menurut Hayek dalam Stiglitz (2000) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut allocative efficiency.
- b. Kedua, Tiebout dalam Stiglitz (2000) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.

Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk self financing dalam membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi

devolusi pada desentralisasi administratif. Selanjutnya dalam pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pentingnya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada 2 mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horisontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan. Mekanisme tersebut adalah:

- a. Dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa-jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- b. Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan demikian perbedaan pokok kedua teori tersebut adalah terletak pada pandangan revenue transfer. Keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.

Kebijakan fiskal secara umum mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang terdiri dari tiga kegiatan pokok; pertama, kebijakan yang terkait pembelian pemerintah atas barang dan jasa; kedua, kebijakan terkait perpajakan; dan ketiga, kebijakan terkait pembayaran transfer (misal tunjangan keamanan sosial, pembayaran kesejahteraan) kepada rumah tangga.

Sumber-sumber penerimaan negara antara lain berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak dan pinjaman luar negeri. Sementara itu pengeluaran diperuntukan kedalam pengeluaran yang bersifat rutin dan untuk pembangunan. Perkembangan pengeluaran pemerintah dalam perkembangannya digolongkan menjadi tiga bagian (Mangkoesoebroto, 2001) yakni:

- a. Model pembangunan terkait pengeluaran pemerintah yang dikembangkan Rostow dan Musgrave (1991) yang mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan, makin besar persentase investasi swasta terhadap PDB, maka persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil.
- b. Hukum Wagner yang menyatakan bahwa apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.
- c. Teori Peacock dan Wisemen menyatakan pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak meningkat meski tarif pajak tidak dinaikan.

Desentralisasi merupakan alat untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi desentralisasi terutama terdiri dari pembagian fungsi/tugas/ kewenangan antar level pemerintahan. Desentralisasi fiskal biasanya didahului reformasi dari sisi pengeluaran, kemudian diikuti oleh sisi penerimaan.

2.1.3 Keuangan Daerah

- a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal

1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa, 1995 dalam Halim, 2007).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut Mardiasmo (2012:103) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011: 1), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Menurut Halim (2012: 101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

d. Pendapatan Transfer

Sumber-sumber pendapatan transfer atau bisa disebut juga sebagai bantuan pemerintah pusat/provinsi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21, serta DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian

e. Belanja Modal

Menurut Halim (2004:73), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi pemerintah daerah melalui pengukuran kinerja setiap aktifitas kegiatannya baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan

suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

Dalam arti sempit Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).

Adapun indikator pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Selain itu, Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Adapun kriteria rasio kemandirian keuangan daerah dan pola hubungannya adalah:

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Kriteria rasio efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 - 100	Kurang Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
60 - 80	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dari

beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Todaro dalam Sasana (2009) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003: 99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) Akumulasi modal; yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, (2). Pertumbuhan penduduk; yang pada akhirnya akan

memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan (3) Kemajuan teknologi; berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi, masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan, yaitu:

a. Teori pertumbuhan Klasik.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan.

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan suatu perekonomian maka semakin terbatas untuk mengadakan inovasi. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pada akhirnya akan mencapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “stationary state”. Namun berbeda dengan pandangan Klasik, pada pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang dicapai ketika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar menganggap bahwa Pertambahan dan kesanggupan memproduksi tidak secara sendirinya akan Menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Harrod-Domar sependapat dengan Keynes bahwa pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru

akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan pada masa sebelumnya.

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Dalam konsep regional, Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada.

2.1.6 Pengangguran

Definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak berkerja tetapi sedang mencari perkerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang

sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran konjungtur/siklis, struktural dan friksional.

a. Pengangguran Konjungtur/Siklis (*cyclical unemployment*)

Adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa-masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang berhenti di gudang. Perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksinya karena barang-barang tidak laku di pasar. Karenanya kapasitas produksi dikurangi atau produksi dihentikan. Akibatnya, sebagian buruh diberhentikan. Di pihak lain pertambahan penduduk tetap berlangsung dan menghasilkan angkatan kerja baru. Dampaknya, tenaga kerja banyak yang tidak dapat bekerja.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari pertanian ke sektor industri. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi tenaga kerja di sektor industri membutuhkan penyesuaian, sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Pengangguran struktural juga dapat terjadi karena penggunaan alat yang semakin canggih. Sebagai contoh penggunaan traktor di sektor pertanian mengakibatkan sebagian buruh tani menganggur.

c. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional timbul karena perpindahan orang-orang yang tidak henti-hentinya dari satu daerah ke daerah lainnya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya, dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda. Pengangguran Friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Sebagai contoh pelamar tidak mengetahui dimana ada lowongan dan pengusaha juga tidak mengetahui dimana tersedia tenaga kerja (Kuncoro, 2004).

2.1.7 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otoda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Siragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningktan PAD secara langsung. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat mengindikasikan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Teori ekonomi menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, yang dinyatakan semakin banyak out put nasional, mengindikasikan

semakin banyak orang yang bekerja sehingga seharusnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ekonom Arthur Okun dalam Arsyad (2015) mengemukakan bahwa adanya biaya tinggi dari output terhadap tingkat pengangguran, yaitu meningkatnya tingkat pengangguran sebagai akibat dari penurunan output. Konsep hubungan negatif output dan pengangguran ini dikenal sebagai hukum Okun. Okun menyimpulkan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan meningkat 0,3 persen dari satu kuartal ke kuartal berikutnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen per kuartal atau 4 persen per tahun diperlukan untuk menjaga tingkat pengangguran tetap. Penurunan tingkat pengangguran diduga dapat terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja sebagai akibat pertumbuhan ekonomi akan menyerap angkatan kerja, mengurangi jumlah penganggur, dan menurunkan tingkat pengangguran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemandirian dan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran pada daerah tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

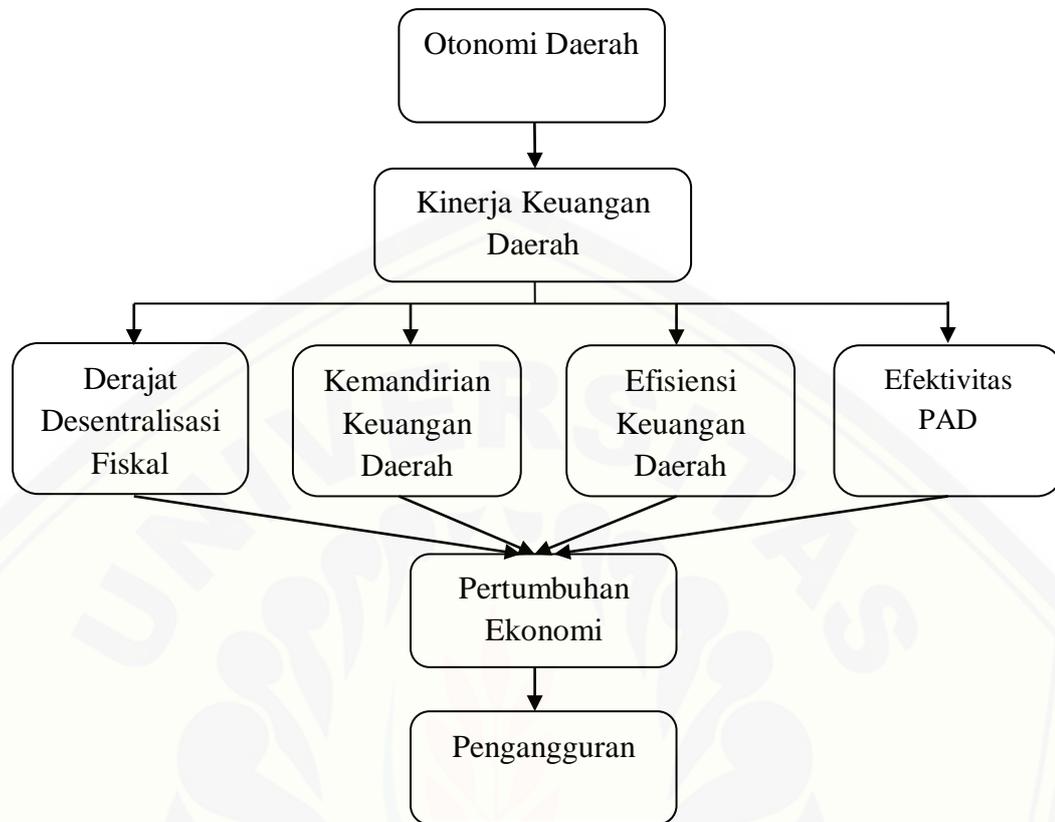
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Wuku Astuti(2015)/ Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011)	Metode regresi berganda dan Metode linear sederhana.	Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio efesiensi, Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan.	Rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi; Rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan
2	Ratna Sholikah (2011)/ Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009	Statistik deskriptif dan Regresi linear berganda.	Kemampuan keuangan daerah, Kemandirian keuangan daerah, dan Pertumbuhan ekonomi (PDRB).	Rasio kemampuan keuangan daerah memiliki rata-rata 6,68% yang tergolong rendah; Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata 7,84% dan termasuk kategori rendah sekali dan mempunyai pola hubungan instruktif; dan Kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Ardi Hamzah (2008)/Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)	Metode regresi berganda, Metode regresi sederhana, dan Analisis Jalur.	Rasio kemandirian 1, Rasio kemandirian 2, Rasio efesiensi, Rasio efektivitas, Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan.	Rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efesiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap terhadap pengangguran; Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; dan Kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan.
4	Syamsudin, Bayu dan Syahrina (2015)/ Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap	Statistik deskriptif, Regresi linear, dan Analisis	Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio efesiensi,	Rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Rasio

	Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	Jalur.	Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran.	efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Pengaruh tidak langsung Rasio kemandirian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pengangguran dan kemiskinan; Pengaruh tidak langsung rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan positif terhadap pengangguran; dan Pengaruh tidak langsung rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan positif terhadap pengangguran.
5	Ni Luh Nana dan Dwirandra (2012)/ Pengaruh Kinetja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota propinsi Bali (2007-2011)	Regresi Linear Berganda	Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi, Rasio pertumbuhan pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan.	Rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran; dan Rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pedoman dan dapat menunjukkan alur pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jalur, Maka dapat disusun suatu kerangka konseptual sebagai mana gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Data Diolah (2017)

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
3. Kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *eksplanatory research*, yaitu metode yang menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan dua variabel atau lebih serta menguji hipotesis bahkan menemukan teori baru (Nazir, 1998:16). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016 dengan menggunakan data sekunder *time series*. Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*), Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, pemilihan lokasi berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahunnya. Selain itu Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sorotan pemerintah ataupun masyarakat secara umum karena berkembang lebih cepat daripada kabupaten yang lain. Penelitian ini dimulai dari periode tahun 2001-2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain. Data yang dibutuhkan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Banyuwangi dan Tingkat Pengangguran pada Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016. Data ini merupakan data kuantitatif yang berupa data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Metode Analisa Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran.

3.4.2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

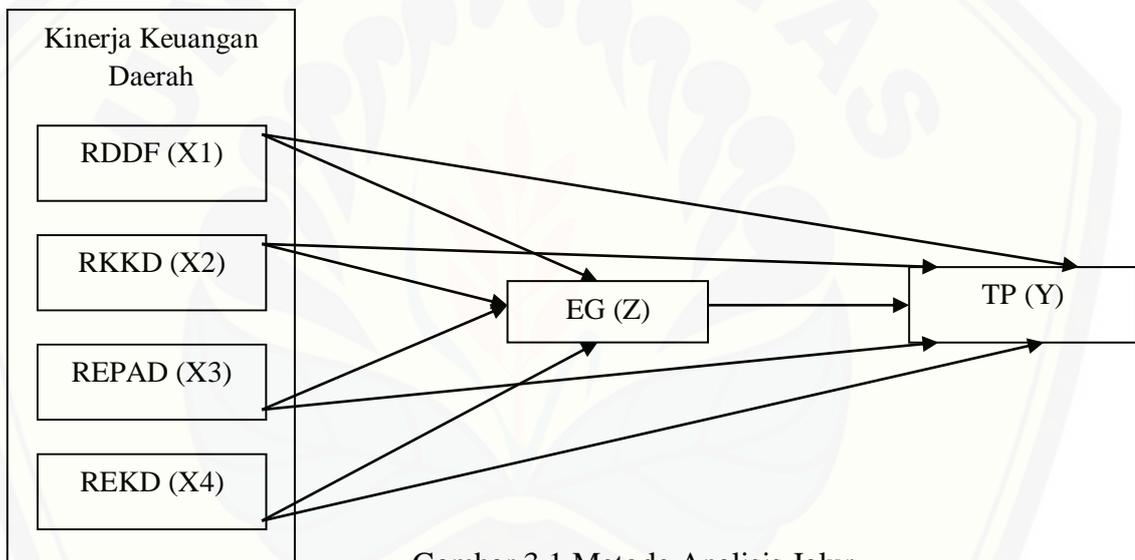
Penelitian ini menggunakan Analisis jalur (*Path Analysis*) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal variabel Kinerja Keuangan Daerah (Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio efensiasi keuangan daerah) Terhadap Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2001-2016 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara. Dengan alat ini dimungkinkan pengujian pengaruh simultan (efek langsung dan tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel lainnya.

Analisis jalur merupakan bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Penggunaan analisis jalur dalam analisis data penelitian didasarkan pada beberap asumsi berikut:

1. Pada model analisis jalur, hubungan antar variabel bersifat linear, adaptif, dan bersifat normal.
2. Hanya sistem aliran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik.
3. Variabel terikat minimal dalam skala umur interval atau rasio.

4. Menggunakan sampel *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
5. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan *reliable*), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung.
6. Model yang dianalisis diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

Hubungan kausal antar variabel dapat dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis). Signifikansi model tampak berdasarkan koefisien beta (β) yang signifikan terhadap jalur yaitu:



Gambar 3.1 Metode Analisis Jalur

Sumber : Data diolah (2017)

3.4.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

a. Uji F

Uji F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali,2014:22).

Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan (overall significance) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah variabel Y secara linear berhubungan dengan variabel X.

Formulasi hipotesis uji F :

1. $H_0 : b_1, b_2 = 0$

Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

2. $H_1 : b_1, b_2 \neq 0$

Ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Secara matematis nilai F dapat juga dinyatakan dalam rumus (Ghozali,2014:23):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1) (1 - R^2)}{(n - k)}$$

Keterangan :

F = uji F

R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara signifikan
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara signifikan.

b. Uji t

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya antara variabel Kinerja Keuangan Daerah (X), terhadap pertumbuhan ekonomi (Z) dan Tingkat Pengangguran (Y). Rumus yang digunakan adalah :

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan:

t = test signifikan dengan angka korelasi

b_i = koefisien regresi

Se (b_i) = *standart error* dari koefisien korelasi

Formulasi hipotesis uji t:

1. H₀ : b_i = 0, i = 1, 2, 3, 4
H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
2. H_a : b_i ≠ 0, i = 1, 2, 3, 4
H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
3. *Level of significance 5%.*

3.4.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Model ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien.

a. Uji Normalitas Model

Imam Ghazali dan Fuad (2008:33) menyatakan bahwa asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah uji normalitas. Analisis jalur termasuk dalam analisis multivariate karena menggunakan lebih dari 1 (satu) variabel karena minimal memiliki 3 variabel yakni 1 variabel bebas, 1 variabel intervening, dan 1 variabel terikat. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati data normal.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individu masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov apabila sampel < 50 dan menggunakan uji Shapiro-Wilk apabila sampel > 50 . Adapun dasar pengambilan keputusan variabel yang terdistribusi normal atau tidak apabila:

1. Jika nilai probabilitas atau signifikansi suatu variabel lebih dari alfa ($\alpha = 0,05$), maka variabel tersebut dinyatakan terdistribusi normal.
 2. Jika nilai probabilitas atau signifikansi suatu variabel kurang dari alfa ($\alpha = 0,05$), maka variabel tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal.
- b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Salah satu cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Adapun dasar pengambilan keputusan ada atau tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu model apabila:

1. Jika nilai signifikansi antara variabel dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Sebaliknya, Jika nilai signifikansi antara variabel dengan absolut residual kurang dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5 Metode *Trimming*

Metode *Trimming* adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan dari model, variabel bebas yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Model trimming terjadi ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan terdapat variabel yang tidak signifikan. Cara menggunakan metode *trimming* yaitu menghitung ulang koefisien jalur tanpa menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Langkah-langkah pengujian analisis jalur dengan menggunakan metode *trimming* adalah sebagai berikut (Kuncoro;Engkos & Riduwan, 2008:154):

1. Merumuskan persamaan struktural.
2. Menghitung koefisien regresi untuk setiap sub struktur yang telah dirumuskan.
3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan).
4. Menghitung koefisien jalur secara individual.
5. Menguji kesesuaian antar model analisis jalur.
6. Memaknai dan menyimpulkan.

3.6 Perhitungan Jalur

Dalam analisis jalur pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dapat berupa pengaruh langsung dan tidak langsung (*Direct and Indirect Effect*). Berbeda dengan model regresi biasa yang hanya memperhitungkan pengaruh langsung.

1. Menghitung pengaruh langsung (*Direct Effect* atau DE)
 - a) Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z)
 $DE_{zx1} = X1 \rightarrow Z$
 - b) Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z)
 $DE_{zx2} = X2 \rightarrow Z$
 - c) Pengaruh rasio efektivitas PAD (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z)
 $DE_{zx3} = X3 \rightarrow Z$

- d) Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z)
 $DE_{zx4} = X_4 \rightarrow Z$
- e) Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal (X_1) terhadap tingkat pengangguran (Y)
 $DE_{yx1} = X_1 \rightarrow Y$
- f) Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap tingkat pengangguran (Y)
 $DE_{yx2} = X_2 \rightarrow Y$
- g) Pengaruh rasio efektivitas PAD (X_3) terhadap tingkat pengangguran (Y)
 $DE_{yx3} = X_3 \rightarrow Y$
- h) Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah (X_4) terhadap tingkat pengangguran (Y)
 $DE_{yx4} = X_4 \rightarrow Y$
- i) Pengaruh pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap tingkat pengangguran (Y)
 $DE_{yz} = Z \rightarrow Y$
2. Menghitung pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect* atau IE):
- a) Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal (X_1) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)
 $IE_{zx1} = X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$
- b) Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)
 $IE_{zx2} = X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$
- c) Pengaruh rasio efektivitas PAD (X_3) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)
 $IE_{zx3} = X_3 \rightarrow Z \rightarrow Y$
- d) Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah (X_4) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)
 $IE_{zx4} = X_4 \rightarrow Z \rightarrow Y$

3. Menghitung pengaruh total (*Total Effect* atau TE)
 - a) Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal (X_1) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)

$$TEY_{ZX1} = DE_{ZX1} + IEY_{ZX1}$$
 - b) Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)

$$TEY_{ZX2} = DE_{ZX2} + IEY_{ZX2}$$
 - c) Pengaruh rasio efektivitas PAD (X_3) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)

$$TEY_{ZX3} = DE_{ZX3} + IEY_{ZX3}$$
 - d) Pengaruh rasio efesiensi keuangan daerah (X_4) terhadap tingkat pengangguran (Y) melalui pertumbuhan ekonomi (Z)

$$TEY_{ZX4} = DE_{ZX4} + IEY_{ZX4}$$

3.7 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang akan dianalisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (Mahmudi, 2016). Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt: Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt : Total Pendapatan Daerah tahun t

Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001: 2)

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007 : 169)

Adapun kriteria rasio kemandirian keuangan daerah dan pola hubungannya adalah:

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
 2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
 3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.
- d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima (Halim, 2004). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 - 100	Kurang Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
60 - 80	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil (Sukirno, 2006). Rumus yang digunakan untuk menghitung Pertumbuhan Ekonomi adalah:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

f. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan persentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

BAB 5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh kinerja keuangan daerah yaitu: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik kinerja keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.
2. Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.
3. Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh kinerja keuangan daerah yaitu: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.

5.3 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada sehingga mampu meningkatkan PAD dan mampu lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi, serta dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin

untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat.

2. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan perhatian khusus di bidang lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah harus melakukan hubungan kepada pihak swasta agar investasi di Kabupaten Banyuwangi semakin bertambah, sehingga nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Banyuwangi. Selain itu, Banyuwangi terkenal akan pariwisata budaya dan kearifan lokalnya. Pengembangan potensi dari prospektif pariwisata akan mampu menyerap tenaga kerja baru sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran.
3. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau angkatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan Tingkat pengangguran misalnya dengan memberikan pinjaman lunak tanpa agunan untuk modal kerja usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Astuti, Wuku, 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*. Vol. 6, No. 1: 11-14.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Banyuwangi Dalam Angka 2016*. Juli. BPS Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi*. September. BPS Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. September. BPS Banyuwangi.
- Bappenas. 2004. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- De Mello L. 2010. Fiscal Decentralisation and Public Investment: The Experience of Latin America. OECD Economics Department Working Papers 824.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Edisi Refisi Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamzah, Ardi, 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. III No. 1: 11-17.
- Kuncoro , Mudrajad. 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001, *Ekonomi Publik, Edisi-III*. BPFE: Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw.
- Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. 1984. *Public Finance in Theory and Practice*. New York. McGraw-Hill Inc
- Nazir, Moh. 1998. *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Oates, Wallace. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016*. BPKAD Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007. *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. 23 November 2007. Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Putriani, Ni Luh Nana, dan A. Dwirendra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.6, No.3. 493-495
- Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro: Edisi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riduwan. 2008. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfa Beta
- Sadono Sukirno, 2008, *Teori Pengantar Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sasana (2009) Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- Sholikhah, Ratna, 2011. Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
- Stiglitz, J.E. 2000. *Economics of the Public Sector. Third Ed.* New York: W.W. Norton & Company.
- Subrata, W. S. Adi. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*. Semarang: AnekaIlmu.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Syamsudin, B. T. Cahya, dan S. N. Dewi. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan kemiskinan Tahun 2011-2016. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*. Vol.17, No.1: 16-19.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi , Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. 7 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004. *Perimbangan Keuangan*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.
- Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 2: 20-24.

LAMPIRAN

Lampiran A

Data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah (Jutaan Rp)	Drajat Desentralisasi Fiskal (%)	Skala Interval
2001	18.093,380	348.912,710	5,186	Sangat Kurang
2002	35.422,590	406.617,310	8,712	Sangat Kurang
2003	41.969,840	488.445,510	8,593	Sangat Kurang
2004	36.279,150	494.501,230	7,337	Sangat Kurang
2005	42.344,850	535.885,020	7,902	Sangat Kurang
2006	48.168,771	769.008,318	6,264	Sangat Kurang
2007	61.264,251	887.357,022	6,904	Sangat Kurang
2008	71.203,728	1.017.592,368	6,997	Sangat Kurang
2009	86.977,566	1.143.692,290	7,605	Sangat Kurang
2010	90.656,906	1.208.157,901	7,504	Sangat Kurang
2011	113.364,553	1.450.320,872	7,817	Sangat Kurang
2012	139.514,584	1.690.113,711	8,255	Sangat Kurang
2013	183.235,877	1.917.058,035	9,558	Sangat Kurang
2014	283.488,703	2.418.962,319	11,719	Kurang
2015	346.992,331	2.779.148,430	12,486	Kurang
2016	367.872,666	2.805.619,074	13,112	Kurang
Rata-rata			8,497	Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Data diolah 2018)

Lampiran B

Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer (Jutaan Rp)	Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2001	18.093,380	316.418,240	5,718	Rendah Sekali (Instruktif)
2002	35.422,590	340.555,480	10,401	Rendah Sekali (Instruktif)
2003	41.969,840	393.666,870	10,661	Rendah Sekali (Instruktif)
2004	36.279,150	405.732,370	8,942	Rendah Sekali (Instruktif)
2005	42.344,850	434.585,060	9,744	Rendah Sekali (Instruktif)
2006	48.168,771	699.274,191	6,888	Rendah Sekali (Instruktif)
2007	61.264,251	801.317,188	7,645	Rendah Sekali (Instruktif)
2008	71.203,728	886.178,731	8,035	Rendah Sekali (Instruktif)
2009	86.977,566	917.129,053	9,484	Rendah Sekali (Instruktif)
2010	90.656,906	927.297,553	9,776	Rendah Sekali (Instruktif)
2011	113.364,553	982.023,260	11,544	Rendah Sekali (Instruktif)
2012	139.514,584	1.199.056,681	11,635	Rendah Sekali (Instruktif)
2013	183.235,877	1.313.865,318	13,946	Rendah Sekali (Instruktif)
2014	283.488,703	1.387.611,469	20,430	Rendah Sekali (Instruktif)
2015	346.992,331	1.494.315,803	23,221	Rendah Sekali (Instruktif)
2016	367.872,666	1.847.137,393	19,916	Rendah Sekali (Instruktif)
Rata-rata			11,749	Rendah Sekali (Instruktif)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Data diolah 2018)

Lampiran C

Data Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016

Tahun	Anggaran PAD (Jutaan Rp)	Realisasi PAD (Jutaan Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2001	15.402,863	18.093,380	117,468	Efektif
2002	22.059,850	35.422,590	160,575	Efektif
2003	37.384,090	41.969,840	112,267	Efektif
2004	38.280,890	36.279,150	94,771	Tidak Efektif
2005	37.965,160	42.344,850	111,536	Efektif
2006	39.815,690	48.168,771	120,979	Efektif
2007	48.167,080	61.264,251	127,191	Efektif
2008	53.812,549	71.203,728	132,318	Efektif
2009	65.008,654	86.977,566	133,794	Efektif
2010	78.153,008	90.656,906	115,999	Efektif
2011	106.124,048	113.364,553	106,823	Efektif
2012	132.846,110	139.514,584	105,020	Efektif
2013	171.602,586	183.235,877	106,779	Efektif
2014	225.108,843	283.488,703	125,934	Efektif
2015	303.235,752	346.992,331	114,430	Efektif
2016	353.260,989	367.872,666	104,136	Efektif
Rata-rata			118,126	Efektif

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Data diolah 2018)

Lampiran D

Data Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2001	338.638,320	348.912,710	97,055	Kurang Efisien
2002	371.530,700	406.617,310	91,371	Kurang Efisien
2003	494.763,610	488.445,510	101,294	Tidak Efisien
2004	481.882,140	494.501,230	97,448	Kurang Efisien
2005	497.773,830	535.885,020	92,888	Kurang Efisien
2006	801.734,234	769.008,318	104,256	Tidak Efisien
2007	1.038.139,701	887.357,022	116,992	Tidak Efisien
2008	924.243,284	1.017.592,368	90,826	Kurang Efisien
2009	1.170.748,675	1.143.692,290	102,366	Tidak Efisien
2010	1.219.931,614	1.208.157,901	100,975	Tidak Efisien
2011	1.442.970,170	1.450.320,872	99,493	Kurang Efisien
2012	1.680.895,444	1.690.113,711	99,455	Kurang Efisien
2013	1.885.285,267	1.917.058,035	98,343	Kurang Efisien
2014	2.296.135,156	2.418.962,319	94,922	Kurang Efisien
2015	2.602.147,073	2.779.148,430	93,631	Kurang Efisien
2016	2.856.046,955	2.805.619,074	101,797	Tidak Efisien
Rata-rata			98,945	Kurang Efisien

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Data diolah 2018)

Lampiran E

Data Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi

Tahun	PDRB (Jutaan Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2000	4.486,1	
2001	5.160,2	15,03
2002	5.725,8	10,96
2003	7.725,7	34,93
2004	8.029,3	3,93
2005	11.880,0	47,96
2006	14.006,0	17,90
2007	15.889,0	13,44
2008	18.379,0	15,67
2009	20.728,0	12,78
2010	32.463,8	56,62
2011	36.950,9	13,82
2012	42.108,3	13,96
2013	47.364,7	12,48
2014	53.371,2	12,68
2015	60.179,3	12,76
2016	66.340,8	10,24
Rata-rata		19,07

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Lampiran F

Data Tingkat Pengangguran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001-2016 (Dalam Persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2001	3,11
2002	2,43
2003	5,22
2004	4,38
2005	7,31
2006	7,12
2007	9,97
2008	9,72
2009	4,05
2010	3,92
2011	3,71
2012	3,40
2013	4,69
2014	7,17
2015	2,55
2016	2,52
Rata-rata	5,08

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Lampiran G

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	16	5,19	13,11	8,4969	2,21377
X2	16	5,72	23,22	11,7491	5,11931
X3	16	94,77	160,58	118,1263	15,63314
X4	16	90,83	116,99	98,9445	6,29554
Z	16	3,93	56,62	19,0725	14,48539
Y	16	2,43	9,97	5,0794	2,45723
Valid N (listwise)	16				

Keterangan :

X1 : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

X2 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

X3 : Rasio Efektivitas PAD

X4 : Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Z : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Y : Tingkat Pengangguran Terbuka

Lampiran H

Analisis Jalur

1. $X - Z$ **Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,674 ^a	,630	,522	,72831

a. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX1, LogX2

b. Dependent Variable: LogZ

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,183	4	,046	12,086	,000 ^b
	Residual	5,835	11	,530		
	Total	6,018	15			

a. Dependent Variable: LogZ

b. Predictors: (Constant), LogX4, LogX3, LogX1, LogX2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,503	18,466		,081	,937
	LogX1	,522	3,891	,204	4,134	,000
	LogX2	,109	2,502	,168	2,044	,016
	LogX3	,472	1,650	,294	3,286	,007
	LogX4	,136	3,272	,135	2,011	,026

a. Dependent Variable: LogZ

2. X, Z – Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,449 ^a	,420	,409	,50779

a. Predictors: (Constant), LogZ, LogX4, LogX3, LogX1, LogX2

b. Dependent Variable: LogY

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,651	5	,130	10,505	,000 ^b
	Residual	2,578	10	,258		
	Total	3,229	15			

a. Dependent Variable: LogY

b. Predictors: (Constant), LogZ, LogX4, LogX3, LogX1, LogX2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,441	12,879		,422	,682
	LogX1	,634	2,715	,338	4,234	,000
	LogX2	,719	1,744	,610	4,112	,001
	LogX3	,164	1,155	,045	2,142	,020
	LogX4	,346	2,282	,179	3,590	,011
	LogZ	,137	,210	,187	2,065	,025

a. Dependent Variable: LogY

Lampiran I

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LogX1	LogX2	LogX3	LogX4	LogZ	LogY
N		16	16	16	16	16	16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,1101	2,3866	4,7641	4,5927	2,7447	1,5221
	Std. Deviation	,24769	,39409	,12587	,06154	,63338	,46397
Most Extreme Differences	Absolute	,163	,182	,118	,155	,246	,141
	Positive	,163	,182	,118	,155	,246	,105
	Negative	-,111	-,125	-,111	-,087	-,192	-,141
Test Statistic		,163	,182	,118	,155	,246	,141
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,162 ^c	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,011 ^c	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,100	5,099		,216	,834
	LogX1	,424	1,075	,454	,394	,702
	LogX2	-,251	,691	-,428	-,364	,724
	LogX3	1,010	,457	,549	2,209	,052
	LogX4	-1,270	,903	-,338	-1,406	,190
	LogZ	-,011	,083	-,029	-,128	,900

a. Dependent Variable: RES3

Lampiran J

Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,503	18,466		,081	,937
	LogX1	,522	3,891	,204	4,134	,000
	LogX2	,109	2,502	,168	2,044	,016
	LogX3	,472	1,650	,294	3,286	,007
	LogX4	,136	3,272	,135	2,011	,026

a. Dependent Variable: LogZ

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,441	12,879		,422	,682
	LogX1	,634	2,715	,338	4,234	,000
	LogX2	,719	1,744	,610	4,112	,001
	LogX3	,164	1,155	,045	2,142	,020
	LogX4	,346	2,282	,179	3,590	,011
	LogZ	,137	,210	,187	2,065	,025

b. Dependent Variable: LogY